

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara republik Indonesia;
4. Peraturan presiden Nomor 50 tahun 2008 tentang perubahan kesembilan peraturan presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang organisasi dan tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Peraturan Menteri Agama Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan menteri agama ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakaif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau di miliknya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk syariah.
2. Wakaif adalah pihak aygn mewakafkan ung miliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang di ucapkan secara lisan dan/atau kepada nazhir untuk mewakafkan uang muliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan uang meliknya guna di kelola nazhir sesuai dengan perutukan wakaf yang ditungkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.

7. Lembaga keuangan syariah –penerima wakaf uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh menteri agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat wakaf uang, yang selanjutnya disingkat SWU adalah suratbukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada kapada wakif dan nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan pewakafan di Indonesia.
10. Direktur Jendral adalah direktur jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

IKRAR WAKAF

Pasal 2

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir diharapkan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah wakil menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas wakif : nama dan identitas nazhir ,nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal asul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.

Pasal 3

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah nazhir penerahan AIW.
- (2) Sertifikat wakaf uang diberikan kepada wakif dan tembusanya diberikan kepada nazhir.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada kepada menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan / fotocopy AIW dan SWU yang di sahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten / kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang .
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat.
 - a. Identitas LKS-PWU,wakif,nazhir, dan sanksi
 - b. Jumlah nominal wakaf uang
 - c. Asal-usul uang
 - d. Peruntukan wakaf
 - e. Jangka waktu wakaf uang
 - f. Nomor sertifikat wakaf uang, dan
 - g. Nomor pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dicatat dalam buku pendaftaran.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama Provinsi.
- (2) Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri melalui Direktur Jendral.

Pasal 8

- (1) LKS-PWU Wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada menteri melalui Direktur jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal alas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, Menteri dapat memberikan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara; atau
 - c. Pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjukan akuntan public untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Pasal 12

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai alat dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap nazhir.
- (4) BWI dapat menunjuk akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyapaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan ini diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundang di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN AGAMA RI
Kepala Bagian Penelaahan dan penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan